**SAMA SAJA ATAU BERBEDA**

**DARI YANG SEBELUMNYA**

**DALAM MENGUNDANG INVESTOR LUAR**

**MASUK KE SUMBAR ?**

**Mochtar Naim**

241111

T

ANGGAL 1 Desember 2011 ini di Jakarta Gubernur Sumbar Prof Dr Irwan Prayitno akan menggelar “Potensi dan Temu Usaha Sumatera Barat dan Presentasi Potensi dan Peluang Investasi Sumbar” yang akan disampaikan oleh 4 Bupati, 1 Walikota di samping paparan Kepala BKPMP Sumbar dengan Pembukaan oleh Gubernur dan Sambutan Kepala BKPM Pusat.

 Pegelaran ini diadakan adalah dalam rangka mengajak dan membuka peluang bagi para investor untuk menginvestasikan modal usahanya di Sumbar untuk mengembangkan potensi-potensi SDA (Sumber Daya Alam) dan SDB (Sumber Daya Budaya) yang dimiliki oleh Sumbar. Potensi SDA dan SDB yang ditawarkan kelihatannya cukup bervariasi, dari potensi geothermal dan micro hidro di Pasaman, micro hidro di Solok Selatan, pengembangan pantai Gandoriah di Pariaman, industri pengolahan jagung dan pengembangan wisata pantai Sasak, pengembangan pariwisata Danau Maninjau dan wisata Linggai. Daftar ini tentu bisa diperpanjang lagi walau yang ditawarkan adalah itu.

 Sumbar, sebagaimana halnya dengan Indonesia lainnya, bagaimanapun, sejak awal Orde Baru di awal tahun 1970-an telah melakukan ajakan yang sama kepada para investor dalam dan luar negeri, khususnya kepada investor asing multinasional dan para investor konglomerat yang sekarang secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri telah menguasai praktis seluruh kegiatan ekonomi Nusantara ini, di semua lini kegiatan, dari hulu sampai ke muara, di darat, laut dan juga udara. Sumbar bukanlah kekecualian tapi bagian dari jaringan ekonomi para kapitalis multi-nasional pasar bebas, dari Barat maupun Timur, yang bercorak nasional, regional dan internasional itu.

 Dengan prinsip ekonomi liberal-kapitalistik pasar-bebas yang dikembangkan sejak masa Orde Baru sampai sekarang, yang telah berjalan selama setengah abad ke mari ini, terjadilah kerjasama triumvirat yang saling mendukung dan saling menguntungkan antara kelompok kapitalis multi-nasional yang selama ini menguasai ekonomi dunia, dengan kelompok konglomerat non-pribumi Cina dan para penguasa politik pribumi yang bertengger di atasnya sambil menfasilitasi dan melindungi berjalannya usaha-usaha investasi di bidang apapun di Indonesia ini, dari hulu sampai ke muara, di darat, laut dan udara. Sistem ekonomi liberal-kapitalistik yang tidak memasukkan dalam perhitungannya kepentingan rakyat terbanyak dalam menghapus kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan dengan pertimbangan moral berdasarkan keadilan, kesejahteraan dan kemanusiaan, telah mengendalikan ekonomi Indonesia ini sejak masa Orde Baru itu sampai ke era Reformasi jilid dua sekarang ini. Apa yang dipraktekkan di masa kemerdekaan ini berjalan setali tiga uang dengan yang dilakukan di masa kolonial dahulu, yang prinsipnya tetap adalah dualisme ekonomi: ekonomi formal-moderen liberal-kapitalistik pasar bebas dari para kapitalis multi-nasional dan konglomerat non-pribumi dengan 5-6 % dari jumlah penduduk bersebelahan dengan ekonomi non-formal tradisional berskala mikro dari penduduk asli yang merupakan 90-an persen dari jumlah penduduk.

 Yang terjadi adalah keberlanjutan. Jutaan hektar tanah ulayat rakyat di lingkaran luar, khususnya di Pasaman, Darmasyraya, Solok Selatan dan Pesisir Selatan, yang tadinya dimiliki oleh rakyat secara turun-temurun, demi pembangunan yang diserahkan penguasaan dan pengelolaannya kepada para investor itu lalu diambil alih oleh negara dengan HGUnya diserahkan kepada para investor itu untuk jangka waktu panjang sampai bisa diperpanjang berkali-kali selama bergenerasi sampai di atas 100 tahun.

 Sementara itu rakyat yang tadinya punya tanah ulayat itu kebanyakan menjadi kuli, pekerja kasar dan buruh lepas lainnya di perusahaan-perusahaan multi-nasional di atas bekas tanahnya itu, yang hujan kehujanan, panas kepanasan, dan diangkut dengan truk-truk terbuka, dari kampung ke kebun, pulang-pergi, berdempetan berpegangan bahu antara laki-laki dan perempuan, melalui jalan tanah yang tidak rata, terhuyung ke kiri dan ke kanan. Mereka dibayar kalau bekerja, tidak dibayar kalau tidak bekerja. Mereka dijerat oleh kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan dan ketidak-berdayaan untuk merubah nasib sendiri.

 Sebagai peningkah, kepada penduduk asli disediakan perkebunan plasma @ 2 ha per KK yang disiapkan oleh perusahaan perkebunan sampai menghasilkan tetapi yang hasilnya dijual dan disalurkan kepada perusahaan dengan harga yang ditentukan secara sepihak oleh perusahaan. Seluruh jalur usaha, dari produksi ke prosesing ke marketing, dalam dan luar negeri, seluruhnya mereka kuasai. Sebagai peningkah juga, cukup banyak dari pejabat negara, dari kabupaten dan provinsi ataupun pusat yang mendapat jatah siluman sebagai upeti untuk jasa-jasa baik yang diberikan.

 Di bidang kelautan dan perikanan laut, kecuali rakyat pribumi yang masih menghela pukat sambil berdendang di tepi pantai, juga punya perahu kecil dan tambak-tambak di tepi pantai. Selebihnya, di seluruh perairan di manapun di negara kelautan dan kepulauan terbesar di dunia ini, yang menguasai ekonomi kelautan adalah non-pri konglomerat Cina. Di Sumbar sendiri, armada-armada perikanan yang lalu-lalang di sepanjang perairan dan di laut lepas sampai dengan pelabuhan perikanan dengan segala fasilitas yang ada juga dikuasai oleh mereka. Di bidang galian, gas, minyak dan panas bumi, semua, idem ditto.

 Sejauh ini tidak kelihatan ada gebrakan yang ingin hendak ditempuh dalam merombak sistem perekonomian Indonesia ini secara mendasar, yakni dari sistem ekonomi liberal-kapitalistik pasar bebas yang dikuasai oleh kelompok multi-nasional dan konglomerat non-pri ke bunyi pasal 33 dan 34 UUD1945, di mana a.l. dikatakan: Pasal 33 ayat (1): “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;” dan ayat (4): “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersmaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

\*

 Mari kita lihat, sampai sejauh mana aparat Pemda Sumbar kita dengan para Bupati, Walikota dan Gubernurnya dapat menghayati bunyi dan semangat UUD1945 kita itu yang pesan dan misinya sangat gamblang berorientasi dan berpihak kepada ekonomi kerakyatan yang berkeadilan itu. Mari juga kita lihat opsi-opsi apa yang ditawarkan oleh Pemda kita kepada para investor dalam dan luar negeri itu, apakah hanya sekadar melanjutkan apa yang telah ada dan berjalan selama ini atau ada gebrakan baru yang lebih berpihak pada kepentingan rakyat jelata di Sumbar sendiri. Tidak kurangnya, peluang ini sekaligus untuk juga melihat: Satunya kata dengan perbuatan. \*\*\*